

PARTICIPATING IN MAINTAINING WORLD PEACE: THE DEPLOYMENT OF KONTINGEN GARUDA I TO EGYPT IN 1957

Ikut Serta Menjaga Ketertiban Dunia: Pengiriman Kontingen Garuda I ke Mesir 1957

Omar Mohtar ^{1a(*)}, Muhammad Hasan Izzurrahman^{2b}

¹Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan

² Jurusan PPKn, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan

^a*omar.mohtar@unimed.ac.id*

^b*hasanizzur@unimed.ac.id*

(*) Coresspodence Author

omar.mohtar@unimed.ac.id

How to Cite: Mohtar and Izzurrahman. (2026). Participating In Maintaining World Peace: The Deployment of Kontingen Garuda I to Egypt in 1957. doi: 10.36526/js.v3i2.6531

Abstract

Received : 15-11-2025
Revised : 27-02-2026
Accepted : 13-03-2026

Keywords:

Suez Crisis,
Military, UN,
Garuda Troops,
Peacekeeping Force

This study explains the reasons behind the deployment of the Kontingen Garuda I to Egypt and the tasks carried out during their mission from January to September 1957. The research uses the historical method, which includes several steps such as topic selection, heuristics, source criticism, interpretation, and historiography. In this study, the author uses primary sources such as newspapers and publications from the Ministry of Information of the Republic of Indonesia that are relevant to the research theme. Based on the analysis of several primary sources, the deployment was motivated by the escalating tensions between Egypt and France, the United Kingdom, and Israel during the Suez Crisis. The dispatch of Kontingen Garuda I represented Indonesia's free and active foreign policy as well as its effort to participate in maintaining world peace. While in Egypt, the Kontingen Garuda I was assigned to maintain security along the Egypt-Israel border and to repair roads and infrastructure in their area of operation.

PENDAHULUAN

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada alinea IV tercantum kalimat "Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan." Bagi Indonesia, kalimat tersebut bermakna bahwa Bangsa Indonesia menolak dengan tegas segala bentuk penjajahan yang ada di dunia. Riwayat panjang Bangsa Indonesia telah menunjukkan bahwa Indonesia pernah lama berada di bawah penjajahan. Rakyat Indonesia juga sudah cukup menderita selama berada di bawah penjajahan oleh bangsa lain, terutama Belanda. Faktor penjajahan kemudian membangkitkan semangat kebangsaan yang muncul di awal abad ke-20 yang lahir melalui pendidikan (Ricklefs, 2022).

Hingga tahun 2025, Republik Indonesia masih tetap mengupayakan untuk terjadinya perdamaian dunia. Salah satu cara yang dilakukan oleh Bangsa Indonesia untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan mengirimkan pasukan perdamaian ke berbagai negara konflik. Hingga Oktober 2025 masih mengirimkan pasukan perdamaian yang biasa disebut Kontingen Garuda, ke beberapa daerah seperti Lebanon Selatan dan Republik Demokratik Kongo (tni.mil.id, 2025). Selain Lebanon Selatan dan Republik Demokratik Kongo, sejak 1957 Kontingen Garuda menjaga perdamaian di beberapa negara, seperti Mesir, Vietnam, Sudan, dan Bosnia.

Bentuk pengiriman pasukan ini merupakan salah satu wujud pembuktian dan peran serta aktif Republik Indonesia untuk ikut serta dalam ketertiban dunia. Sampai dengan tahun 2025, pasukan Indonesia yang dikirim dalam misi perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa sudah mencapai Kontingen Garuda ke-XXXIX, sejak pengiriman Kontingen Garuda I tahun 1957 ke Mesir. Pengiriman pasukan ke Mesir saat itu tidak terlepas dari ketegangan terjadi antara Mesir, Prancis,

Inggris, dan Israel. Kondisi itu terjadi karena usaha nasionalisasi Terusan Suez yang dilakukan Mesir untuk menjadikan Terusan Suez menjadi miliknya (Jatmika, 2016).

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana peran Kontingen Garuda I dalam misi perdamaian di Mesir. Selain itu, tulisan ini diharapkan dapat memperkaya penulisan sejarah mengenai pengiriman pasukan dari Indonesia ke wilayah-wilayah konflik di dunia. Penulis mengajukan dua pertanyaan penelitian, pertama latar belakang apa yang kemudian membuat Indonesia mengirimkan pasukan perdamaian ke Mesir? Kedua, bagaimana peran pasukan perdamaian Indonesia selama berada di Mesir? Dalam penelitian ini, penulis memulai kurun waktu pada Oktober 1956, saat Mesir memutuskan waktu untuk menasionalisasi Terusan Suez. Sementara akhir batasan waktu penelitian, akan penulis akhiri pada September 1957, sesuai dengan masa akhir tugas Kontingen Garuda I di Mesir. Sementara itu, untuk dimensi spasial, penelitian ini hanya akan membahas Kontingen Garuda I, baik sebelum berangkat hingga selama berada di Mesir.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode sejarah. Metode penelitian sejarah terdiri atas lima tahap (Kuntowijoyo, 2013). Tahapan dimulai dari pemilihan topik, pengumpulan sumber, verifikasi sumber, interpretasi, dan historiografi. Pada tahapan pertama atau pemilihan topik, penulis memilih topik ini karena merupakan topik yang menarik, mengingat hingga saat ini Indonesia masih mengirimkan pasukan perdamaian ke wilayah Timur Tengah dan sekitarnya. Kontingen Garuda I menjadi permulaan bagi Indonesia untuk mengirimkan pasukan perdamaian ke beberapa wilayah konflik di dunia.

Tahapan penelitian dilanjutkan dengan pengumpulan sumber, yaitu penulis mengumpulkan sumber yang terkait dengan topik penulisan. Penulis menemukan beberapa sumber yang terkait langsung dengan topik penelitian penulis, seperti beberapa tulisan yang terkait dengan Krisis Suez yang melatarbelakangi munculnya ketegangan antara Mesir, Israel, Inggris, dan Prancis. Sumber penting lain penulis dapatkan dari buku Sejarah TNI-AD 1945-1973. Dalam salah satu bagian, dijelaskan mengenai Kontingen Garuda I di Mesir. Penulis juga menggunakan buku Garuda Perdamaian, yang diterbitkan oleh Kementerian Penerangan pada 1957. Buku tersebut secara umum berisi mengenai kisah-kisah yang ditulis oleh beberapa anggota Kontingen Garuda I. Ada banyak informasi menarik yang bisa penulis dapatkan dari buku tersebut. Selain dua buku tersebut, penulis juga mendapatkan beberapa sumber primer, yaitu pemberitaan surat kabar yang penulis dapatkan melalui situs delpher.nl dan <https://khastara.perpusnas.go.id/>. Penulis mendapatkan cukup banyak surat kabar yang memberitakan mengenai Kontingen Garuda I, terutama pada kurun waktu Januari hingga September 1957.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Nasionalisasi Terusan Suez

Sejak zaman kuno, telah banyak orang berusaha membangun kanal untuk menghubungkan Laut Mediterania Timur dengan Laut Merah. Sejarah tercipta tepat di tahun 1854, Terusan Suez modern mulai dibangun ketika insinyur kebangsaan Perancis bernama Ferdinand de Lesseps memperoleh izin dari otoritas Mesir untuk membangun kanal besar di Selat Suez. Dengan demikian, perdagangan antara Asia dan Eropa jauh lebih mudah karena tidak perlu lagi mengelilingi seluruh benua Afrika, menjadikan Terusan Suez sebagai rute perdagangan utama hingga saat ini.

Guna mewujudkan proyek yang besar ini, perusahaan bernama the Universal Suez Canal Company didirikan pada tahun 1858. Perusahaan ini mengawasi pembangunan kanal antara tahun 1859 dan 1869, ketika akhirnya diresmikan. Menurut laporan UN Historical Security Council (UNHSC) tahun 2023, kesepakatan dicapai pada tahun 1866, yang memberikan hak kepada perusahaan untuk mengoperasikan kanal hingga tahun 1968. Perlu digarisbawahi, meskipun perusahaan ini bersifat swasta, pemerintah Prancis maupun Inggris tetap memegang saham besar di perusahaan tersebut. Pada tahun 1875, pemerintah Inggris membeli sejumlah besar saham

perusahaan dari pemerintah Mesir. Oleh karena itu, Terusan Suez, pada praktiknya, berada di bawah kendali dua kekuatan Barat.

Di sisi lain, bagi mayoritas warga Mesir, Terusan Suez merupakan simbol imperialisme Barat, terutama pasca 1882, ketika Inggris menyerbu Mesir untuk menumpas pemberontakan nasionalis yang dimulai pada tahun sebelumnya. Kala itu, Mesir menjadi protektorat de facto, meskipun secara teknis masih merupakan Khedivate di bawah kendali Kekaisaran Ottoman hingga awal Perang Dunia I, ketika Inggris mendirikan Sultanat Mesir. Sehingga, pada tahun 1882, menandai awal puluhan tahun kendali Inggris atas Mesir. Patut dicatat juga bahwa pada tahun 1888, Konvensi Konstantinopel ditandatangani, yang menjamin kebebasan navigasi di Terusan Suez (UNHSC, 2023).

Pada tahun 1919, terjadi revolusi nasionalis di Mesir, pada akhirnya memaksa Inggris untuk mengakui kemerdekaan negara tersebut, yang kemudian menjadi Kerajaan Mesir pada tahun 1922. Tentu hal ini tidak mengakhiri pengaruh Inggris di Mesir. Faktanya, the Universal Suez Canal Company terus mengoperasikan Terusan Suez, dan Inggris menolak untuk menarik pasukannya dari Terusan Suez. Keberadaan militer Inggris di Terusan Suez juga dijamin oleh Perjanjian Anglo-Mesir tahun 1936 (Rystad, 2018). Oleh karena itu, ketegangan yang berkembang sepanjang abad sebelumnya, serta sentimen nasionalis anti-Inggris yang semakin kuat, tetap ada dan menjadi pendorong utama Revolusi Mesir tahun 1952, di mana menggulingkan monarki dan akhirnya mendirikan republik baru (Hamed, n.d.).

Korupsi yang menyelimuti keluarga kerajaan, serta kekalahan memalukan dari negara Israel yang baru dibentuk dalam Perang Arab-Israel Pertama 1948-49, turut memainkan peran besar dalam revolusi tersebut. Dipicu oleh sekelompok perwira nasionalis Angkatan Darat Mesir yang terorganisir dalam Free Officers Movement, di bawah pimpinan Mohammed Naguib. Namun pada 1954, Naguib digulingkan dari kekuasaan, dan pemimpin karismatik lain dari gerakan yang sama, Gamal Abdel Nasser, menjadi presiden republik baru, menerapkan sistem satu partai yang ketat, ditandai dengan retorika nasionalis pan-Arab yang kuat, bertujuan mengakhiri dominasi Barat di dunia Arab, memodernisasi Mesir, serta meningkatkan kesejahteraan sosial bagi rakyat Mesir (Shupe et al., 1980). Meskipun kekurangan kebebasan sipil, Nasser menjadi pemimpin yang sangat populer di Mesir, bahkan di seluruh dunia Arab (Hahn, 2006).

Isu terkait upaya nasionalisasi Terusan Suez bermula pada 20 Oktober 1955, ketika Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mengumumkan rencana untuk memberikan bantuan kepada Mesir dalam pembangunan Aswan High Dam. Proyek besar ini bertujuan untuk mengendalikan banjir dan mengatur aliran air di Sungai Nil, yang sangat vital bagi pertanian Mesir. Tawaran ini merupakan bagian dari kebijakan AS untuk mendukung stabilitas di Timur Tengah serta mengurangi pengaruh Uni Soviet yang semakin berkembang di kawasan tersebut. Inggris juga menunjukkan ketertarikan untuk ikut serta dalam proyek ini, dan pada 16 Desember 1955, negara tersebut menyatakan kesiapan untuk memberikan bantuan sebesar USD84 juta untuk memulai tahap pertama dari proyek tersebut. Namun, Nasser mulai menunda keputusan dan meminta tambahan bantuan, yang kemudian memicu ketegangan antara Mesir dan negara-negara Barat terkait dengan syarat-syarat bantuan yang diajukan. Berdasarkan laporan khusus dari Departemen Angkatan Laut AS pada tahun 1974, pada 19 Juli 1956, melalui Menteri Luar Negeri John Foster Dulles, Amerika Serikat memutuskan untuk menarik tawarannya untuk membiayai Aswan High Dam karena Mesir tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan, sehingga keputusan ini membuat Nasser merasa dikhianati (Office of Naval Research, 1974).

Sebagai tanggapan terhadap penarikan bantuan tersebut, pada 26 Juli 1956, Nasser mengumumkan nasionalisasi Terusan Suez dalam sebuah pidato yang disampaikan di Midan al-Tahrir di Kairo. Nasser menyatakan bahwa pemerintah Mesir mengambil alih kontrol atas Terusan Suez untuk menjamin bahwa pendapatan dari terusan tersebut akan digunakan untuk membiayai Aswan High Dam, yang sebelumnya dibiayai oleh negara-negara Barat. Tindakan ini memicu reaksi keras dari Inggris dan Perancis, yang memiliki saham besar di the Universal Suez Canal Company. Bagi kedua negara ini, nasionalisasi terusan tersebut tidak hanya mengancam kepentingan ekonomi

mereka, tetapi juga merupakan simbol penurunan pengaruh kolonial mereka di Timur Tengah. Inggris dan Perancis segera mulai merencanakan intervensi militer untuk menggulingkan Nasser dan mengembalikan kendali atas terusan tersebut (Office of Naval Research, 1974).

Prancis, Inggris, dan bahkan Amerika Serikat menanggapi bahwa klaim the Universal Suez Canal Company memiliki sifat internasional, sehingga kebal dari nasionalisasi. Barat juga berargumen bahwa konsesi tahun 1866 telah dimasukkan dalam Konvensi Konstantinopel tahun 1888, sehingga nasionalisasi dinilai melanggar perjanjian internasional. Selain itu, mereka juga mengklaim bahwa air Terusan Suez bersifat internasional, sehingga tidak dapat dikelola oleh satu pemerintah saja. Sebagai tanggapan, Mesir berargumen bahwa tidak ada dasar hukum internasional yang nyata untuk mencegah Mesir menjamin hak lintas bebas melalui Terusan. Mesir juga berargumen bahwa nasionalisasi tidak melanggar Konvensi Konstantinopel karena Pasal 14 dalam konvensi tersebut menyatakan: "the engagements resulting from the present treaty shall not be limited by the duration of the acts of concession of the Universal Suez Canal Company." Artinya, kompensasi ini akan diberikan setelah aset asing perusahaan diserahkan (UNHSC, 2023).

Ketegangan antara Mesir dan Inggris-Prancis-Israel

Meskipun Krisis Suez telah memanans selama puluhan tahun atau bahkan berabad-abad – sebenarnya sejak pembukaan Terusan Suez pada tahun 1869 – ledakan bersenjata krisis ini dipicu oleh nasionalisasi Perusahaan Terusan Suez oleh Jenderal Nasser, Presiden Mesir, pada 26 Juli 1956. Menurut (Moeller, 2016), tindakan Nasser disebabkan banyak faktor, (1) Amerika Serikat tidak jadi membantu membiayai Aswan High Dam, (2) pendudukan Inggris di wilayah Mesir sejak 1882, dan (3) konflik dengan Israel. Israel khawatir tentang kekuatan militer Mesir setelah Nasser membeli senjata dari Cekoslowakia, mereka mempersiapkan serangan terhadap Mesir, meskipun ada resolusi PBB yang berusaha menyelesaikan konflik. Menurut rencana mereka, Israel menyerang Sinai dan Gaza pada 29 Oktober 1956. Prancis dan Inggris kemudian mengeluarkan ultimatum kepada Mesir dan Israel untuk menghentikan pertempuran dan menarik pasukan mereka dari zona kanal. Sementara Israel, Mesir menolaknya, dan pasukan Prancis dan Inggris pun mendarat di Port Said, Sinai, pada 31 Oktober 1956 (Moeller, 2016).

Menariknya, dalam laporan UN Historical Security Council (UNHSC) tahun 2023 disebutkan bahwa serangan Israel telah direncanakan sejak awal antara ketiga negara: Israel, Inggris, dan Prancis. Terdapat perjanjian yang ditulis dan ditandatangani oleh perwakilan ketiga negara, dokumen rahasia ini dikenal sebagai Protokol Sevres. Meskipun Perdana Menteri Inggris Anthony Eden memerintahkan penghancuran semua salinan yang dimiliki Inggris, salinan Israel dari dokumen tersebut bertahan hingga kini (UNHSC, 2023). Di dalam dokumen rahasia tersebut, sangat jelas rencana serangan Israel bertujuan agar Prancis dan Inggris dapat mengirim pasukan untuk melindungi Terusan Suez dan memastikan navigasi bebas melalui terusan tersebut, seolah-olah, dengan cara tersebut dapat merebut kembali Terusan Suez dan menggulingkan Nasser dari kekuasaan tanpa dianggap sebagai pihak yang memulai perang tanpa provokasi.

Kesepakatan ketiga negara dilakukan secara rahasia, tanpa sepengetahuan Amerika Serikat. Pemerintah Inggris dan Prancis beranggapan bahwa operasi tersebut akan berlangsung begitu cepat sehingga mereka dapat menghindari kecaman internasional, dan juga berencana menggunakan hak veto mereka di Dewan Keamanan PBB untuk menunda tanggapan internasional. Mengutip dari penelitian Rystad, alasan mengapa Prancis dan Inggris memutuskan untuk mengambil langkah radikal ini karena nasionalisasi Terusan Suez hanyalah puncak dari serangkaian konflik dan ketegangan yang dimulai setelah keberhasilan revolusi 1952, dan terutama setelah Nasser berkuasa pada 1954 (Rystad, 2018).

Nasionalisme pan-Arab Nasser bukan hanya ancaman bagi kepentingan Barat di Timur Tengah, tetapi juga jalan bagi Uni Soviet untuk memperluas pengaruhnya di kawasan tersebut (Hahn, 2006). Penting untuk dicatat bahwa ketika Nasser berkuasa, ia memperkenalkan istilah Sosialisme Arab, yang secara teknis bukan Marxisme atau sistem komunisme gaya Soviet, namun berupaya memperbaiki ketidakadilan sosial melalui pembangunan ekonomi, industrialisasi dan

redistribusi tanah sembari memberikan peran utama negara dalam ekonomi. Menurut Hamed, Nasser tidak tertarik pada ideologi tertentu dan menemukan ide-idenya dari literatur gerakan politik Mesir secara umum. Tidak ada bukti bahwa Nasser familiar dengan karya-karya pemikir nasionalisme Arab seperti Sati' al-Husri, Michel 'Aflaq atau lain sebagainya sebelum tahun 1956. Nasser hanya memiliki pandangan bahwa pembebasan nasional Mesir tidak dapat dicapai dengan adanya kekuatan imperialis di kawasan Timur Tengah; Inggris di Libya, Yordania, Irak, Aden, Teluk Persia dan Arabia Selatan, Prancis di Afrika Utara dan Israel di Palestina. Sulit bagi Mesir yang merdeka untuk melindungi wilayahnya dengan adanya garnisun dan pangkalan militer asing di negara-negara tetangga (Hamed, n.d.).

Prancis tentu juga memiliki alasan sendiri untuk tidak menyukai Nasser, yaitu Aljazair. Perlu diingat bahwa pada saat itu, kekaisaran kolonial Prancis sedang runtuh dan meninggalkan Indochina pada tahun 1954, di mana dua tahun kemudian harus mengakui kemerdekaan Maroko. Di tahun 1954 juga, Aljazair mulai menunjukkan pemberontakan melawan Prancis. Nasser tidak hanya memberikan dukungan retorik kepada pemberontak Aljazair, tetapi juga memberikan senjata dan pelatihan militer kepada mereka. Sebagai respons, pemerintah Prancis semakin mendekati ke Israel. Di satu sisi, dukungan besar terhadap rakyat Yahudi telah berkembang di Prancis pasca Perang Dunia II. Pemerintah Prancis, yang dipimpin oleh Perdana Menteri Guy Mollet, bertindak sebagai mediator antara Inggris dan Israel, yang pada akhirnya menyakinkan keduanya untuk melaksanakan operasi militer menggulingkan Nasser, sembari berusaha membuatnya tampak seolah-olah Inggris dan Prancis tidak melanggar hukum internasional (Vaisse, 1991).

Pembentukan United Nations Emergency Force (UNEF)

Di tengah ketegangan antara Mesir dengan Prancis, Inggris dan Israel, pada 12 September 1956, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat John Foster Dulles mengusulkan pembentukan Suez Canal Users Association (SCUA) untuk memastikan bahwa Terusan Suez dapat dioperasikan secara internasional tanpa mengganggu perdagangan dunia. Namun, Inggris dan Perancis merasa bahwa SCUA terlalu lemah dan mulai berencana untuk bertindak secara militer. Inggris dan Perancis kemudian mengusulkan rencana yang lebih konkret kepada Israel, yang menginginkan pembalasan terhadap kebijakan Nasser yang mendukung perjuangan Aljazair melawan kolonialisme Perancis. Israel mengusulkan serangan bersama untuk menyingkirkan Nasser.

Ketika serangan Israel dimulai dengan invasi ke Semenanjung Sinai, Amerika Serikat, yang pada saat itu dipimpin oleh Presiden Dwight D. Eisenhower, sangat menentang intervensi militer oleh Inggris dan Perancis. Amerika Serikat tidak ingin perang ini berkembang menjadi konflik yang lebih luas, terutama dengan Uni Soviet. Eisenhower merasa bahwa perang ini dapat memicu ketegangan dengan Uni Soviet dan merusak kebijakan luar negeri AS di Timur Tengah. Pada 1 November 1956, Amerika Serikat mengusulkan resolusi di PBB yang mendesak untuk segera dihentikannya serangan militer. Amerika menekankan bahwa krisis ini harus diselesaikan melalui jalur diplomatik. PBB segera mengambil langkah untuk memulai pembicaraan mengenai gencatan senjata dan mengatur pengiriman United Nations Emergency Force (UNEF) untuk memonitor pelaksanaan gencatan senjata. Pada 6 November 1956, Inggris dan Perancis akhirnya menerima tekanan internasional dan menyetujui gencatan senjata, meskipun serangan militer mereka masih berlangsung beberapa hari (Office of Naval Research, 1974).

Pada 15 November 1956, UNEF mulai tiba di Mesir untuk mengawasi gencatan senjata dan memastikan bahwa pasukan asing mundur dari Mesir. PBB bertindak sebagai mediator yang efektif dalam menghentikan kekerasan. Sementara itu, pada 22 Desember 1956, pasukan Inggris dan Perancis mulai menarik diri dari Mesir, menyelesaikan sebagian besar operasi militer mereka. Israel, di bawah tekanan internasional, juga mulai menarik pasukannya dari Mesir pada 6 Maret 1957, menyelesaikan penarikan mereka setelah beberapa bulan. Terusan Suez akhirnya dibuka kembali pada 29 Maret 1957, dan pelayaran internasional dimulai kembali. Mesir mempertahankan kendali atas terusan tersebut, dan Nasser muncul sebagai pahlawan di dunia Arab.

Keterlibatan Indonesia dalam UNEF

Pasukan UNEF merupakan gabungan dari pasukan militer yang berasal dari berbagai negara, seperti Selandia Baru, Norwegia, India, Kanada, Pakistan, Denmark, dan Indonesia. Keterlibatan Indonesia dalam pasukan UNEF tidak terlepas dari politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif. Dalam alinea 4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara 1945 juga telah disebutkan bahwa Indonesia ikut serta melaksanakan ketertiban dunia. Pemerintah Indonesia menyatakan kesediannya untuk ikut dalam pasukan UNEF pada 8 November 1956. Pemerintah mengeluarkan pengumuman yang isinya antara lain:

1. Pemerintah Indonesia memutuskan untuk ikut serta dalam pasukan-pasukan PBB seperti yang dimaksud oleh resolusi Sidang Umum PBB,
2. Besarnya sumbangan Indonesia dalam pasukan-pasukan itu, diberikan dalam batas-batas kekuatan Indonesia sehingga tidak mengurangi potensi pertahanan Indonesia sendiri,
3. Ikut sertanya Indonesia dalam pasukan-pasukan polisi PBB itu didasarkan atas pengertian, bahwa pasukan-pasukan polisi itu bertugas semata-mata untuk memelihara perdamaian di Timur Tengah dan tidak akan bersifat suatu campur tangan ke dalam urusan-urusan dalam negeri di negara di mana pasukan-pasukan tersebut ditempatkan (Dinas Sejarah TNI Angkatan Darat, 1979).

Kesediaan Pemerintah Indonesia untuk ikut terlibat dalam pasukan UNEF menjadi bentuk nyata keterlibatan Indonesia untuk ikut serta dalam perdamaian dunia. Pemerintah dan PBB kemudian melakukan koordinasi terkait dengan hal-hal yang perlu disiapkan keberangkatan menyusul pasukan dari negara lain menuju Mesir. Presiden Nasser menyambut baik dan menyetujui pengiriman pasukan asal Indonesia (Kementerian Penerangan, 1957). Disetujuinya pengiriman pasukan asal Indonesia ke Mesir terjadi karena hubungan baik yang sudah terjalin antara Indonesia dan Mesir sejak 1947, saat Mesir mengakui kemerdekaan Indonesia. Mesir mengakui kemerdekaan Indonesia pada 1 Juni 1947 yang dilanjutkan dengan perjanjian persahabatan antara keduanya pada 10 Juni 1947 (Abdurrahman Mohammad et al., 2014).

Pemerintah sendiri mulai melakukan persiapan untuk membentuk pasukan setelah pengumuman tanggal 8 November 1956. Pasukan yang akan dikirim ke Mesir seluruhnya berjumlah 3 kompi pasukan infanteri sebanyak 550 orang yang dipilih dari pasukan yang berasal dari Teritorium IV Jawa Tengah dan Teritorium V Jawa Timur (Dinas Sejarah TNI Angkatan Darat, 1979). Tidak hanya memilih pasukan, pemerintah kemudian melakukan persiapan dengan mengirimkan rombongan ke Mesir untuk melihat kondisi. Penunjukkan komandan sebagai pemimpin pasukan Kontingen Garuda I selama berada di Mesir juga dilakukan. Letnan Kolonel Infanteri Hartoyo kemudian ditunjuk sebagai pemimpin pasukan. Sementara wakil pemimpin dijabat oleh Mayor Infanteri Soediono Suryantoro. Sebelum ditunjuk sebagai wakil pemimpin, Mayor Infanteri Soediono Suryantoro mendapatkan kenaikan pangkat dari kapten menjadi mayor (Java Bode, 1957b).

Awal Januari 1957, pasukan sudah siap untuk diberangkatkan menuju Mesir. Sebelum keberangkatan berbagai upacara dilakukan untuk melepas pasukan yang kemudian dikenal dengan nama Pasukan Garuda I atau Kontingen Garuda I ini. 31 Desember 1956, Presiden Sukarno dan Kepala Staf Angkatan Darat, Mayor Jenderal A.H. Nasution secara resmi melepas pasukan untuk berangkat ke Mesir. Dalam upacara yang dilakukan di Istana Negara, Presiden Sukarno menyampaikan pesan kepada para pasukan agar dapat menjadi duta Bangsa Indonesia selama berada di Mesir (Java Bode, 1957a). Pada kesempatan itu Presiden Sukarno juga meninjau kesiapan pasukan yang akan berangkat ke Mesir pada 8 Januari 1957. Dalam pidatonya, Presiden Sukarno berpesan agar Kontingen Garuda I untuk menjaga nama baik Indonesia selama berada di Mesir (Dinas Sejarah TNI Angkatan Darat, 1979). Selain Presiden Sukarno dan Mayor Jenderal A.H. Nasution, beberapa tokoh juga hadir dalam upacara pelepasan tersebut, seperti Perdana Menteri A.H. Sastroamijoyo, Kepala Staf Angkatan Laut Subiyakto, Kolonel Gatot Subroto, dan para atase militer negara sahabat

Keberangkatan Kontingen Garuda I menuju ke Mesir menggunakan pesawat angkut Globemaster milik Angkatan Udara Amerika Serikat. Pesawat-pesawat tersebut tiba di Bandara Kemayoran pada 7 Januari 1958. Sembilan pesawat dipersiapkan untuk mengangkut 550 anggota Kontingen Garuda I (Algemeen Indisch Dagblad: de Preangerbode, 1957a). Pesawat mulai diberangkatkan menuju Beirut pada Rabu 9 Januari pagi dengan dilepas oleh Mayor Jenderal A.H. Nasution, Walikota Sudiro, dan beberapa perwira tinggi dari Markas Besar Angkatan Darat (Het Nieuwsblad voor Sumatra, 1957b).

Dari Beirut, perjalanan dilanjutkan menuju Mesir. Di Mesir Kontingen Garuda I mendarat di Pangkalan Udara Abu Suweir, dekat Kairo. Dari pemberitaan yang ada, kemungkinan Kontingen Garuda I diberangkatkan dalam waktu yang berbeda. Rombongan pertama tiba pada 7 Januari, sedangkan rombongan terakhir Kontingen Garuda tiba di Pangkalan Udar Abu Suweir pada Senin, 14 Januari 1957 (Algemeen Indisch Dagblad: de Preangerbode, 1957b). Tiba di Kairo, pasukan Kontingen Garuda tidak langsung ditempatkan menuju lokasi penjagaan. Pasukan masih harus menunggu perintah sehingga ditempatkan terlebih dahulu di Kamp. Shandura. Saat menunggu perintah dari PBB, terjadi pergantian kepemimpinan di Kontingen Garuda I. Pemimpin Kontingen Garuda I, Letnan Kolonel Infanteri Hartoyo diganti oleh Mayor Suadi Suromiharjo. Pergantian itu terjadi karena ketidakcocokan Letnan Kolonel Infanteri Hartoyo dengan kondisi iklim di Mesir (Java Bode, 1957c).

Kondisi Kontingen Garuda I di Mesir

Dua bulan sejak kedatangannya di Mesir, kabar atau kiprah Kontingen Garuda kembali diberitakan oleh beberapa surat kabar pada bulan Maret 1957. Kabar terbaru mengenai kondisi Kontingen Garuda I disampaikan oleh Kolonel Isman, yang melakukan kunjungan keluar negeri, termasuk Mesir. Di Mesir, Kolonel Isman menemui Kontingen Garuda I yang ditempatkan di Sinai, dekat perbatasan dengan Israel. Penempatan pasukan Kontingen Garuda I di Sinai merupakan perintah dari Letnan Jenderal E.L.M Burns, pemimpin UNEF yang berasal dari Kanada (Kementerian Penerangan, 1957). Saat berada di Mesir, Kolonel Isman menemui Letnan Kolonel Suadi. Dalam pertemuan itu Letnan Kolonel Suadi menyampaikan bahwa kondisi moral Kontingen Garuda I dalam kondisi yang baik, namun ada satu anggota yang sakit karena belum terbiasa dengan kondisi iklim (Java Bode, 1957d). Kondisi iklim padang pasir memang menjadi salah satu tantangan bagi para anggota Kontingen Garuda I. Kondisi iklimnya sangat berbeda karena sangat panas di siang hari, namun juga bisa sangat dingin di malam hari.

23 Maret 1957, majalah mingguan Star Weekly menulis berita mengenai Kontingen Garuda I. Ada banyak suka dan duka yang dialami oleh pasukan Kontingen Garuda I setelah mereka tiba di Mesir. Kamp. Shandura, tempat Kontingen Garuda I menetap, saat rombongan pertama tiba, kondisinya tidak seperti yang mereka harapkan. Setibanya di Kamp. Shandura, kondisi kamp ternyata rusak sehingga para pasukan Kontingen Garuda I harus memperbaikinya terlebih dahulu sebelum bisa dipergunakan (Star Weekly, 1957b). Kondisi iklim menjadi tantangan selanjutnya. Kondisi saat siang hari dan malam hari sangat berbeda. Saat malam, tiga lapis selimut masih belum bisa membuat kondisi mereka menjadi hangat, sehingga kemudian dijanjikan pakaian musim dingin agar kondisi pasukan lebih baik. Masalah makanan juga menjadi salah satu kendala. Makanan yang disediakan berupa kentang dan roti, pasukan Kontingen Garuda I tidak terbiasa dengan kedua jenis makanan tersebut. Lalu roti dan kentang diganti menjadi nasi (Star Weekly, 1957a).

UNEF juga sudah menyiapkan hal-hal yang dapat menjaga kondisi para tentara yang bertugas, seperti makanan dan hiburan. UNEF menyediakan perbekalan makanan seperti rokok, bir, minuman bersoda, bon-bons, dan keperluan lain dengan harga yang murah (Kementerian Penerangan, 1957). Tak hanya itu, UNEF juga menyediakan jadwal rekreasi bagi para tentara yang sedang tidak bertugas. UNEF menyediakan bus yang akan mengantar tentara untuk berkunjung ke berbagai tempat, seperti Kairo, museum, dan Giza untuk melihat piramida (Star Weekly, 1957a). Selain rekreasi, UNEF juga menyediakan pertunjukan film yang dapat dilihat para tentara. Para

pasukan oleh PBB juga diberikan gaji yang besarnya berbeda-beda antara perwira dengan prajurit biasa.

Perbekalan dan berbagai macam makanan tidak hanya disediakan oleh PBB. Bantuan dari dalam negeri juga diberikan oleh beberapa pihak untuk Kontingen Garuda I yang bertugas di Mesir. Dari Kudus, ada dua perusahaan yang mengirimkan bantuan berupa rokok, klobot, dan juga dodol (Java Bode, 1957e). Sementara itu, Unilever Indonesia mengirimkan paket perlengkapan mandi ke TNI AD untuk dikirimkan kepada Kontingen Garuda I di Mesir (Java Bode, 1957f). Bantuan tersebut menjadi bukti bahwa pengiriman Kontingen Garuda I ke Mesir mendapatkan perhatian dari masyarakat Indonesia. Keberadaan Kontingen Garuda I di Mesir juga menjadi perhatian dan dukungan dari beberapa perusahaan di Indonesia. Pasukan Kontingen Garuda I sangat diterima oleh rakyat Mesir. Hal itu terjadi karena tiga alasan, kesamaan agama yaitu Islam, Kontingen Garuda I dikenal sebagai pasukan yang ramah, dan mempunyai corak dan prinsip perjuangan kemerdekaan yang sama (Kementerian Penerangan, 1957).

Dalam rangka memberikan kabar terkini mengenai Kontingen Garuda I di Mesir, dua anggota Kontingen Garuda I, Kapten Sugeng Djarot dan Kapten Hadi Hermono kembali ke Jakarta dari Mesir. Keduanya mendapatkan tugas untuk melapor kepada pimpinan TNI dan melapokan kondisi para anggota Kontingen Garuda I kepada keluarganya masing-masing. Kapten Sugeng Djarot dan Kapten Hadi Hermono terlebih dahulu melapor kepada pimpinan TNI terkait kondisi pasukan Kontingen Garuda I (*Het nieuwsblad voor Sumatra*, 1957). Setelah itu, keduanya melaporkan kondisi Kontingen Garuda I kepada keluarga para anggota (Java Bode, 1957f). Informasi yang didapatkan keluarga Kontingen Garuda I sangat penting mengingat di masa itu komunikasi yang dilakukan hanya melalui surat. Secara umum, kondisi pasukan Kontingen Garuda I di Mesir berada dalam kondisi yang baik. Keduanya juga banyak menginformasikan terkait makanan, iklim, dan tugas yang dilakukan oleh Kontingen Garuda I selama berada di Mesir.

Tugas-Tugas Kontingen Garuda I di Mesir

Secara umum, tugas dari Kontingen Garuda I di Mesir adalah sebagai pasukan penjaga perdamaian dan juga membantu masyarakat yang terdampak konflik. Dari laporan Kapten Sugeng Djarot dan Kapten Hadi Hermono, Kontingen Garuda I pada bulan Mei 1957 ditempatkan di perbatasan antara Mesir dan Gaza, tepatnya di Kamp. Rafah (*Algemeen Indisch Dagblad: de Preangerbode*, 1957c). Hasil dari laporan tersebut diketahui adanya pergerakan pasukan Kontingen Garuda I. Pada awalnya, Kontingen Garuda I ditugaskan di Sinai, kemudian pada bulan Mei oleh pemimpin UNEF dipindahkan ke perbatasan antara Mesir dan Gaza. Tidak semua pasukan Kontingen Garuda I bergerak ke Rafah, karena masih ada yang ditugaskan di Sinai dan Port Said (*Star Weekly*, 1957b).

Kontingen Garuda I langsung bergerak untuk pindah dari Sinai menuju Rafah. Dari Sinai Kontingen Garuda I melewati Qantara dan harus melewati jalan sepanjang 80 km yang sudah dirusak oleh tentara Israel, namun 20 km sudah diperbaiki (Dinas Sejarah TNI Angkatan Darat, 1979). Tiba di perbatasan Mesir dan Gaza, Kontingen Garuda I mendapatkan tugas untuk mengamankan daerah itu dari para penyusup dan menjaga depot makanan serta ternak. Bukan perkara mudah menjaga daerah itu. Hal itu terjadi karena para penyusup yang cukup pandai dalam menjalankan operasinya, sehingga pada satu kesempatan tertentu, anggota Kontingen Garuda I harus melepaskan tembakan peringatan (*Algemeen Indisch Dagblad: de Preangerbode*, 1957c). Kontingen Garuda I juga mendapatkan tugas untuk patroli meninjau pos di sepanjang perbatasan Mesir dan Gaza. Dalam suatu kesempatan, patroli pasukan Kontingen Garuda I pernah bertemu dengan patroli pasukan Israel. Tidak ada ketegangan terjadi dalam pertemuan itu. Kedua pasukan kerap melakukan pembicaraan dan bahkan ada salah satu pasukan perempuan Israel yang bisa berbahasa Indonesia karena menurut pengakuannya pernah tinggal di Surabaya (Kementerian Penerangan, 1957).

Tak hanya kerap berjumpa dengan pasukan Israel, dalam satu kesempatan patroli ada pasukan Indonesia yang tidak sengaja memasuki daerah Israel. Hal itu terjadi karena kondisi medan gurun pasir sehingga pasukan agak kesulitan membaca peta dan tanda-tanda. Mereka baru

mengetahui telah memasuki wilayah Israel ketika ada salah seorang perwira Israel yang mendekati mereka dan menjelaskan bahwa mereka sudah memasuki wilayah Israel (Kementerian Penerangan, 1957). Tidak ada masalah atau ketegangan dalam peristiwa itu, karena pasukan Indonesia segera menghubungi markas pusat UNEF.

Kontingen Garuda I tak hanya bertugas menjaga keamanan di sekitar perbatasan Mesir dan Gaza. Mereka juga melakukan berbagai macam tugas lain, seperti membangun dan memperbaiki sarana dan prasarana di sekitar Kamp. Rafah. Saat Kontingen Garuda I tidak sedang berjaga, mereka menyempatkan untuk memperbaiki jalan-jalan yang ada, setelah selesai diperbaiki beberapa nama jalan diberi nama Jalan Nasution, Jalan Sudirman, dll (Algemeen Indisch Dagblad: de Preangerbode, 1957c). Di perbatasan Mesir dan Gaza, Kontingen Garuda I bertugas bersama dengan pasukan UNEF dari beberapa negara. Selama bertugas di Mesir, Kontingen Garuda I tidak pernah terlibat baku tembak. Meskipun demikian, dilaporkan ada satu anggota Kontingen Garuda I yang gugur saat melakukan tugas di Mesir. Prajurit Satu Misdi, dilaporkan gugur di Mesir karena kecelakaan (Algemeen Indisch Dagblad: de Preangerbode, 1957f). Jenazah Prajurit Satu Misdi kemudian dikirim ke Semarang dan tiba pada pertengahan Agustus 1957.

Penarikan Kontingen Garuda I dari Mesir

Pertengahan Juli 1957, perintah terbaru diterima oleh Kontingen Garuda I dari pemerintah. Pada tanggal 15 Juli 1957, Pemerintah Indonesia secara resmi akan menarik Kontingen Garuda I dari tugasnya di Mesir (Dinas Sejarah TNI Angkatan Darat, 1979). Perintah tersebut muncul karena pemerintah menganggap kondisi di perbatasan Mesir dan Israel telah aman sehingga pemerintah memutuskan untuk menarik Kontingen Garuda I setelah 6 bulan bertugas di Mesir (Algemeen Indisch Dagblad: de Preangerbode, 1957d). Permintaan penarikan pasukan Kontingen Garuda I tersebut tertuang dalam surat yang dikirimkan oleh Sudjarwo Tjondronegoro kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, Dag Hammarskjöld. Ucapan terima kasih tidak hanya datang dari PBB. Presiden Mesir, Gamal Abdel Nasser juga mengucapkan terima kasih kepada Kontingen Garuda I karena telah membantu menjaga perdamaian di perbatasan Mesir dan Israel. Presiden Nasser, menyampaikan ucapan itu saat menerima perwakilan Kontingen Garuda I, Kolonel Juadi di Kairo (Algemeen Indisch Dagblad: de Preangerbode, 1957h).

Dag Hammarskjöld sebenarnya agak menyesalkan keputusan Indonesia tersebut. Sebelumnya ia meminta kepada Indonesia agar mempertahankan setengah pasukan Kontingen Garuda I di Mesir karena masih dibutuhkan oleh UNEF (Java Bode, 1957g). Penyesalan juga disampaikan oleh pemimpin UNEF, Letnan Jenderal E.L.M Burns karena Indonesia tidak mengirimkan pasukan pengganti Kontingen Garuda I (Algemeen Indisch Dagblad: de Preangerbode, 1957g). Meskipun gagal meyakinkan Indonesia, PBB tetap menerima keputusan pengunduran pasukan itu dan memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Indonesia karena telah ikut terlibat dalam menjaga keamanan di perbatasan Mesir dan Israel. Berita tersebut diumumkan oleh PBB pada 21 Juli 1957. Dalam pengumumannya, PBB menyatakan penarikan pasukan yang dilakukan oleh Indonesia tidak akan diikuti oleh sembilan negara lain (Algemeen Indisch Dagblad: de Preangerbode, 1957d). PBB juga menyatakan bahwa secara umum, tugas dari UNEF berjalan dengan baik karena berhasil menjaga kondisi perbatasan antara Mesir dan Israel.

Penarikan Kontingen Garuda I dari perbatasan Mesir-Israel mulai dilakukan pada 6 Agustus 1957 (Algemeen Indisch Dagblad: de Preangerbode, 1957e). Anggota Kontingen Garuda I diberikan waktu untuk bersiap-siap dan menunggu waktu keberangkatan untuk kembali ke Indonesia. Mereka mengisi waktu kosong menunggu keberangkatan dengan melakukan berbagai hal, seperti olahraga, berlatih baris berbaris, dan melakukan bongkar pasang senjata (Dinas Sejarah TNI Angkatan Darat, 1979). Baris berbaris dilakukan sebagai persiapan parade menyambut hari kemerdekaan Republik Indonesia di Rafah. Upacara perpisahan juga dilakukan di Kairo sebelum pasukan akhirnya bertolak kembali ke Indonesia pada 9 September 1957 dengan kapal milik Belanda, Talisse (Algemeen Indisch Dagblad: de Preangerbode, 1957g).

Kepulangan Kontingen Garuda I ke Pelabuhan Tanjung Priok sebelumnya direncanakan pada tanggal 9 September, namun kepulangan baru dilakukan pada tanggal 12 September 1957. Kontingen Garuda I berangkat menuju ke Indonesia melalui Port Said (Het Nieuwsblad voor Sumatra, 1957a). Berbeda dengan keberangkatan menuju Mesir yang menggunakan pesawat udara milik Angkatan Udara Amerika Serikat, kepulangan Kontingen Garuda I menggunakan kapal milik Belanda yang bernama Talisse. Perjalanan laut antara Mesir dan Indonesia memakan waktu 19 hari, menurut jadwal Kontingen Garuda I akan tiba di Jakarta pada 1 Oktober 1957 (Algemeen Indisch Dagblad: de Preangerbode, 1957i). Setibanya di Pelabuhan Tanjung Priok, kedatangan Kontingen Garuda I disambut oleh beberapa pejabat negara.

Beberapa pejabat yang hadir dalam penyambutan itu antara lain, Wakil Perdana Menteri I Hardi, Wakil Perdana Menteri III Dr. J. Leimena, dan Kepala Staf Angkatan Darat. Pada kesempatan itu, Wakil Perdana Menteri I, menyatakan bahwa pemerintah merasa bangga terhadap Kontingen Garuda I karena telah membuat harum nama Indonesia di mata masyarakat internasional (Algemeen Indisch Dagblad: de Preangerbode, 1957j). Dari Pelabuhan Tanjung Priok, rombongan Kontingen Garuda I dibawa menuju Balaikota Jakarta. Perjalanan Indonesia dalam upayanya untuk ikut dalam ketertiban dunia kembali diteruskan dengan pengiriman Kontingen Garuda II ke Kongo tahun 1960. Pengiriman kedua itu membuktikan bahwa dunia internasional memberikan kepercayaan Indonesia untuk ikut terlibat dalam pengamanan dunia (Tanjung & Winarti, 2022).

PENUTUP

Kontingen Garuda I merupakan misi perdamaian pertama yang diikuti oleh Indonesia dalam rangka ikut melaksanakan ketertiban dunia, sesuai amanat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kontingen Garuda I merupakan respon bantuan Indonesia atas ketegangan yang terjadi di Timur Tengah pasca nasionalisasi Terusan Suez yang dilakukan oleh Mesir pada 26 Juli 1956. Nasionalisasi Terusan Suez membuat Inggris, Prancis, dan Israel menyerang Mesir. Awal November 1956, dibentuk United Nations Emergency Force (UNEF), yang bertugas untuk menjaga perdamaian di perbatasan Mesir dan Israel. Pemerintah Indonesia kemudian menyatakan ikut bergabung dalam UNEF karena politik luar negeri bebas-aktif dan ikut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia.

Pasukan Indonesia yang dikirim ke Mesir kemudian dikenal dengan nama Kontingen Garuda I, yang mulai berangkat menuju Mesir pada 8 Januari 1957. Di Mesir, Kontingen Garuda I ditempatkan di beberapa titik, seperti Sinai dan Rafah. Selama berada di Mesir, Kontingen Garuda I mendapatkan tugas untuk mengamankan wilayah Sinai dan perbatasan Mesir-Israel di Rafah dan Gaza. Selain mengamankan wilayah, Kontingen Garuda I juga mendapatkan tugas untuk patroli, memperbaiki jalan raya dan sarana yang ada di sekitar tempat mereka bertugas.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Mohammad, F., Abdullah, I., Sangidu, & Setiawati, S. M. (2014). Ketimpangan Hubungan Indonesia-Mesir 1950-2010: Kajian Tentang Teori Resiprositas. *CMES (Center of Middle Eastern Studies)*, 7(2), 98–111.
- Algemeen Indisch Dagblad: de Preangerbode. (1957a, January 10). *Contingent voor Egypte Bataljon Garuda I vertrokken*.
- Algemeen Indisch Dagblad: de Preangerbode. (1957b, January 16). *Laatste eenheden van Garuda Bat. in Abu Suweir*.
- Algemeen Indisch Dagblad: de Preangerbode. (1957c, May 20). *Garudatroepen Maken het Uitstekend in Gaza*.
- Algemeen Indisch Dagblad: de Preangerbode. (1957d, July 24). *Indonesië trekt zijn Garuda bataljon uit VN-leger terug Geen aanwijzing dat 9 andere landen voorbeeld zullen volden*.
- Algemeen Indisch Dagblad: de Preangerbode. (1957e, August 8). *Garuda – troepen teruggetrokken*.
- Algemeen Indisch Dagblad: de Preangerbode. (1957f, August 19). *Lid Garuda-troepen overleden*.
- Algemeen Indisch Dagblad: de Preangerbode. (1957g, August 21). *Dank voor bijdrage Gen. Burns over de Garuda-troepen*.

- Algemeen Indisch Dagblad: de Preangerbode. (1957h, September 3). *Nasser dankt „Garuda“-troepen.*
- Algemeen Indisch Dagblad: de Preangerbode. (1957i, September 28). *Garuda bataljon komt morgen aan.*
- Algemeen Indisch Dagblad: de Preangerbode. (1957j, September 30). *Na 10 maanden dienst in de vreemde Garuda-troepen gisteren uit Egypte teruggekeerd.*
- Dinas Sejarah TNI Angkatan Darat. (1979). *Sejarah TNI-AD 3 1945-1973, Peranan TNI-AD dalam Mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia* (Vol. 3). Dinas Sejarah TNI Angkatan Darat .
- Hahn, Peter. L. (2006). The Suez Crisis: A Crisis That Changed the Balance of Power in the Middle East. *Foreign Policy Agenda.*
- Hamed, R. A. (n.d.). *Suez Crisis and the Emergence of a National Leader, Nasser and Arab Nationalism 1956-67.*
- Het Nieuwsblad voor Sumatra. (1957a). *Garuda – bataljon ingescheept.*
- Het nieuwsblad voor Sumatra. (1957). *Koeriers uit Egypte.*
- Het Nieuwsblad voor Sumatra. (1957b, January 11). *Bataljon Garuda Vertrokken.*
- Jatmika, S. (2016). *Hubungan Internasional Kawasan Timur Tengah.* Samudera Biru.
- Java Bode. (1957a, January 2). *Kivartiermakers vertrokken Indonesie’s contingent voor politieleger V.N.*
- Java Bode. (1957b, January 2). *Plv. kommandant.*
- Java Bode. (1957c, January 18). *Kommandant Garuda Troepen Vertrokken.*
- Java Bode. (1957d, March 18). *Goed moreel Garuda troepen in Sinai.*
- Java Bode. (1957e, May 10). *Indonesië in Vogelvlucht.*
- Java Bode. (1957f, May 18). *Koeriers van „Garuda” in Midden-Oosten.*
- Java Bode. (1957g, July 31). *Hammarskjöld dankt Indonesie voor „Garuda“-troepen.*
- Kementerian Penerangan. (1957). *Garuda Perdamaian.* Kementerian Penerangan.
- Kuntowijoyo. (2013). *Pengantar Ilmu Sejarah.* Penerbit Tiara Wacana.
- Moeller, E. (2016). The Suez Crisis of 1956 as a moment of transnational humanitarian engagement. *European Review of History: Revue Européenne d’histoire*, 23(1–2), 136–153. <https://doi.org/10.1080/13507486.2015.1121970>
- Office of Naval Research. (1974). *Suez Crisis.* <https://nsarchive.gwu.edu/sites/default/files/documents/20515408/doc-5-cna-suez-1956.pdf>
- Ricklefs, M. C. (2022). *Sejarah Indonesia Modern 1200-2007.* Serambi.
- Rystad, K. (2018). *The Suez Crisis and British Colonial Policy: How the Suez Crisis accelerated the Decolonisation of the British Empire.* Norwegian University of Science and Technology. Norwegian University of Science and Technology.
- Shupe, M. C., Wright, W. M., Hipel, K. W., & Fraser, N. M. (1980). Nationalization of the Suez Canal. *Journal of Conflict Resolution*, 24(3), 477–493. <https://doi.org/10.1177/002200278002400305>
- Star Weekly. (1957a, March 23). *Pasukan “Garuda” Indonesia di Mesir.*
- Star Weekly. (1957b, June 1). *Suka Duka Pasukan Garuda Indonesia di Mesir.*
- Tanjung, W. A., & Winarti, M. (2022). Upaya Kontingen Garuda II Sebagai Pasukan Perdamaian di Republik Kongo (1960-1961). *FACTUM: Jurnal Sejarah Dan Pendidikan Sejarah*, 11(2), 169–178. <https://doi.org/10.17509/factum.v11i2.24425>
- tni.mil.id. (2025, October 3). *Satgas BGC TNI Konga XXXIX-G MONUSCO TA 2025 Siap Berangkat Ke Kongo.* <https://Tni.Mil.Id/View-259805-Satgas-Bgc-Tni-Konga-Xxxix-g-Monusco-Ta-2025-Siap-Berangkat-Ke-Kongo.Html>.
- UNHSC. (2023). *The Suez Crisis of 1956.*
- Vaisse, M. (1991). France and the Suez Crisis. In *Suez 1956* (pp. 131–144). Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780198202417.003.0007>